

Pengelolaan Lahan Sawah dan Reorientasi Target Alih Teknologi Usahatani Padi di Jawa

Sumarno, U.G. Kartasasmita, dan Lukman Hakim¹

Ringkasan

Pemilik lahan tidak selalu harus melakukan pengelolaan usahatani padi sendiri, apabila memiliki kesempatan usaha di luar pertanian. Untuk memperoleh informasi perubahan status penguasaan lahan dan pengelolaan usahatani padi sawah di sentra produksi padi di Jawa dilakukan penelitian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pada tahun 2009, masing-masing mengambil sampel dua kabupaten sentra produksi padi sawah, di ketiga provinsi tersebut, yakni Karawang dan Subang di Jawa Barat, Klaten dan Boyolali di Jawa Tengah, dan Ngawi dan Pasuruan di Jawa Timur. Setiap kabupaten diwakili oleh dua kecamatan, dan di setiap kecamatan diwawancarai minimal dua kelompok tani responden. Luas pemilikan lahan sawah dari 70% petani responden di tiga provinsi tersebut berkisar antara 0,2-0,4 ha/RTP (rumah tangga petani), yang mengindikasikan kecilnya skala usahatani sebagian besar petani padi di Jawa. Sebanyak 45% petani pemilik lahan menyakapkan lahan sawahnya, dan 55% pemilik lahan berfungsi sebagai petani operator. Tingkat penyakapan lebih dari 50% pemilik lahan terdapat di Klaten dan Boyolali, tetapi hanya 15% di Subang. Di Karawang, Ngawi, dan Pasuruan, penyakapan lahan mencapai 40-48%. Alasan utama pemilik lahan menyakapkan lahan adalah kecilnya pendapatan usahatani padi yang diperoleh dari lahan sempit, sehingga petani pemilik lahan memilih usaha di bidang nonpertanian. Penyakap adalah petani penggarap tanpa lahan, yang memperoleh bagian 25-35% dari hasil panen bersih. Penguasaan teknologi oleh petani penyakap pada umumnya masih rendah, rata-rata 63%. Intensitas kontak antara petani penyakap dengan penyuluh pertanian pada umumnya rendah, informasi teknologi lebih sering diperoleh dari petugas sales atau petani tetangga. Oleh karena itu, penyuluhan perlu lebih memprioritaskan kepada petani penyakap dan petani yang memiliki lahan sempit, kurang dari 0,34 ha/RTP, yang merupakan bagian terbesar dari pelaku usahatani padi di Jawa. Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh petani memberikan implikasi perlunya peningkatan penguasaan teknologi oleh penyuluh pertanian, dengan meningkatkan hubungan kerja fungsional yang lebih intensif antara penyuluh dengan peneliti. Penyakapan diperkirakan akan terus meningkat porsinya karena banyaknya petani yang tidak mempunyai lahan. Diperlukan ketentuan baku pembagian hasil panen yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penyakap, dan secara keseluruhan perlu dibangun sistem insentif ekonomi bagi petani padi dalam sistem produksi pangan nasional.

¹ Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Alih teknologi hasil penelitian dari unit kerja Badan Litbang Pertanian diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif apabila terjadi kontak langsung antara penyedia teknologi (pengkaji dan penyuluh) dengan pengguna teknologi. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya program alih teknologi Prima Tani dari tahun 2006 hingga 2009 (Anonim 2006). Keberhasilan program penyuluhan LAKU (latihan dan kunjungan) pada tengah tahun 1960-an hingga tahun 1990-an juga karena adanya kontak langsung antara penyuluh dengan petani. Pada pembangunan pertanian “revolusi hijau” periode 1970-1990-an, sebagian besar pemilik lahan sawah sebagai peserta penyuluhan adalah petani operator aktif usahatani padi. Namun kondisi sosial-ekonomi dan budaya petani di perdesaan sejak 1990-an nampaknya telah berubah, tidak seluruh pemilik lahan bertindak sebagai operator, dan usahatani padi sebagai wahana budaya kehidupan kemasyarakatan dan hubungan kerja sosial telah bergeser menjadi usaha ekonomi upah (Susilowati 2005).

Pada waktu lapangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan di perdesaan masih terbatas, bertani secara aktif (*“farming”*) pada lahan milik sendiri walaupun sempit merupakan pekerjaan yang memberikan status tinggi di mata masyarakat. Hingga tahun 1970-an sangat jarang buruh tani yang diberikan hak untuk mengelola sawah oleh pemilik lahan, kemungkinan dikaitkan dengan upaya memelihara “status”, dimana petani operator merupakan kelas masyarakat perdesaan yang lebih tinggi.

Dengan berkembangnya jenis lapangan pekerjaan, mudahnya transportasi, dan terjadinya peningkatan efisiensi usahatani melalui penggunaan alat mekanis mesin pertanian, tersedia berbagai opsi kerja bagi petani di sektor nonpertanian. Sejalan dengan itu terjadi perubahan kelembagaan hubungan kerja dan sistem pengupahan di perdesaan (Susilowati 2005). Upah kerja berbentuk “bawon” atau upah berupa bagian hasil panen, yang jaman dulu terbuka bagi setiap orang di desa sekitar persawahan, mulai pertengahan tahun 1970-an mengalami perubahan, digantikan oleh sistem bawon secara tertutup (Hayami dan Kikuchi 1981).

Sistem bawon tertutup dimulai dengan adanya sistem “kedokan” atau “ceblokan”, yaitu kesepakatan antara sekelompok pekerja usahatani padi dengan pemilik lahan, bahwa sebagai ganti upah kerja, buruh yang bersangkutan mempunyai hak eksklusif untuk memanen padi dengan upah bawon yang lebih banyak dari biasanya (Wiradi 1978). Besarnya bawon pengedok menurut Wiradi (1974) berbeda-beda, di Jawa Barat dan di Jawa Tengah 1/5 bagian hasil panen, di Jawa Timur 1/10 bagian dari hasil panen. Perbedaan bawon ini kemungkinan berkaitan dengan perbedaan jenis dan volume pekerjaan pengedok. Ketentuan cara pengupahan nonformal ini nampaknya mencakup jenis pekerjaan ceclokkan yang beragam, dan tidak selalu mencakup seluruh pekerjaan usahatani padi.

Sejalan dengan bertambahnya jenis lapangan pekerjaan informal di kota maupun desa, petani mempunyai pilihan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Bagi yang mampu berusaha di luar bidang pertanian, petani pemilik lahan cenderung untuk mengalihkan pengelolaan usahatani-padinya kepada buruh tani (*landless farmers*) di desanya, atas dasar bagi hasil (Wargiono *et al.* 2008). Walaupun sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap sudah ada sejak sebelum tahun 1950-an, namun frekuensinya meningkat tajam sejak tahun 1990-an, oleh adanya peningkatan mobilitas penduduk dan timbulnya berbagai pekerjaan nonformal (Susilowati 2005).

Pada waktu petani pemilik lahan juga sekaligus sebagai petani operator, penyuluhan yang disampaikan kepada mereka cukup efektif. Demikian pula fasilitasi kredit usahatani, penjualan pupuk bersubsidi atau bantuan benih pemerintah, dapat disalurkan kepada pemilik lahan sebagai petani operator. Hingga kini belum diketahui perubahan pola sebaran petani pemilik lahan sebagai operator aktif, dan penggarap sebagai petani penyakap. Kondisi demikian berakibat tidak jelasnya target alih teknologi dan peserta penyuluhan atau target penerima kredit usahatani dan program fasilitasi dari pemerintah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pembimbingan PTT padi sawah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif petani yang bekerja secara langsung di lapangan (Wardana *et al.* 2006, Djatiharti *et al.* 2006, Abdulrachman 2006). Apabila tidak jelas pengelola usahatani padi yang aktif bekerja di lapangan, petugas penyuluhan akan sulit memberikan bimbingan Sekolah Lapang PTT (SLPTT) atau pembimbingan lainnya.

Proses alih teknologi pertanian kepada petani pengguna tidak selalu berjalan secara cepat. Rogers (1983) membagi tingkatan proses adopsi teknologi pertanian menjadi empat tahapan, masing-masing memerlukan waktu tertentu. Apabila petani sudah yakin, dengan melihat bukti dan pengalaman petani tetangga, serta mencoba teknologi sendiri dengan hasil yang positif, mereka bersedia mengadopsi teknologi baru. Inovasi dan transfer teknologi pertanian sejak revolusi hijau pada tahun 1970-an telah mengalami evolusi dalam tiga tahapan (Spielman and Birner 2008), yaitu:

- (1) Periode *National Agriculture Research System (NARS)*, 1970-1980. Proses alih teknologi bersifat terpusat, menekankan pada teknologi teknis agronomis, berupa paket anjuran teknologi yang seragam dan dialihkan secara instruktif dari penyuluh kepada petani.
- (2) Periode *Agriculture Knowledge and Information System (AKIS)*, 1980-1990. Alih teknologi ditekankan pada penerapan teknologi adaptif untuk kesejahteraan petani dan mengutamakan keterkaitan peneliti-penyuluh-petani. Proses penyediaan teknologi adaptif mendasarkan pada hasil penelitian adaptif di lahan petani, melibatkan penyuluh dan petani.
- (3) Periode *Agriculture Innovation System (AIS)*, 1990-2000an. Periode ini menekankan pentingnya pengembangan jejaring organisasi antara unit

kerja penelitian, penyuluhan, pelaku agribisnis dan pelaku usahatani, mengutamakan diperolehnya produk bermutu dan produk inovatif (seperti beras rendah indeks *glikemik*), memanfaatkan peluang ekonomi, dan bersinergi dengan program pemerintah (seperti dalam program PTT).

Sistem alih teknologi pertanian di Indonesia pada masa sekarang masih dalam tahap AKIS dan baru mulai masuk periode AIS, namun perlu diketahui pelaku usahatani yang sebenarnya dan masalah yang dihadapi, untuk dapat secara optimal bersinergi dengan program pemerintah. Pemahaman status pengelolaan lahan sawah untuk memproduksi padi akan memberikan gambaran tingkat stabilitas dan kepastian sistem penyediaan pangan pokok nasional. Petani pemilik lahan, yang sekaligus juga bertindak aktif sebagai operator, mengindikasikan usahatani padi tetap diminati, yang berarti adanya stabilitas sistem penyediaan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat memutakhirkan informasi yang ada sebelumnya, dari segi penyakapan lahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi perubahan status penguasaan lahan dan pengelolaan usahatani padi sawah di sentra produksi di Jawa dalam kaitannya dengan prioritas target alih teknologi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar penyusunan konsep kebijakan dalam penyaluran informasi dan alih teknologi, serta program fasilitasi usahatani padi sawah.

Metodologi

Penelitian menggunakan metode survei, dengan pendekatan pemahaman perdesaan partisipatif, melalui wawancara kelompok tani. Responden berupa kelompok tani, ditentukan secara purposif atas dasar perwakilan petani di suatu hamparan sentra produksi padi sawah. Jawaban yang merupakan kesepakatan kelompok dicatat sebagai jawaban responden, dilengkapi dan diverifikasi oleh informasi dari penyuluh lapangan dan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten.

Penelitian lapangan dilakukan pada tahun 2009 di tiga provinsi. Di Jawa Barat, penelitian dilakukan di Kabupaten Karawang dan Subang, di Jawa Tengah di Kabupaten Klaten dan Boyolali, dan di Jawa Timur di Kabupaten Ngawi dan Pasuruan. Di setiap kabupaten dipilih dua kecamatan, kecuali di Boyolali satu kecamatan. Di setiap kecamatan diwawancarai 2-6 kelompok tani. Informasi dari kelompok tani didiskusikan dan divalidasi dengan penyuluh atau pejabat Dinas Pertanian Kabupaten setempat.

Pertanyaan kunci yang diajukan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Luas pemilikan sawah setiap anggota kelompok tani.
- (2) Distribusi luas kepemilikan lahan dalam kelompok tani.

- (3) Jumlah pemilik lahan aktif sebagai petani operator, dan jumlah pemilik lahan yang mengalihkan pengelolaan lahannya kepada petani penyakap.
- (4) Alasan pemilik lahan tidak mengerjakan sendiri lahan sawahnya.
- (5) Intensitas petani pemilik lahan mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian.
- (6) Komponen teknologi yang sering diajarkan pemilik lahan kepada penyakap.

Pertanyaan untuk petani penyakap (bukan pemilik lahan):

- (1) Intensitas penerimaan informasi teknologi oleh petani penyakap dari berbagai sumber teknologi.
- (2) Tingkat pemahaman berbagai komponen teknologi oleh petani penyakap, meliputi (a) varietas unggul baru-adaptif, (b) teknik persemaian, (c) penyiapan lahan optimal, (d) pengkayaan bahan organik tanah, (e) umur bibit untuk tanam, (f) tanam jajar legowo, (g) pemupukan, (h) pengelolaan air, pengairan berselang-seling, (i) pengendalian hama berprinsip PHT, dan (j) panen dan penanganan hasil panen
- (3) Pemahaman petani penyakap akan makna PTT.
- (4) Porsi pembagian hasil panen padi antara pemilik dengan penyakap.
- (5) Kemudahan/kesulitan petani penyakap mengakses informasi teknologi budi daya padi.

Pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan pertanyaan kunci tersebut juga diajukan guna melengkapi informasi, sesuai dengan tujuan penelitian.

Data dari penelitian ditabulasi dan dicari rata-rata serta kisarannya. Intensitas kepesertaan petani dan penyakap dalam kegiatan penyuluhan dinyatakan secara kualitatif, dari sangat sering, sering, agak sering, jarang, hingga tidak pernah. Peran berbagai sumber informasi teknologi diukur dengan ranking, dari yang tersering (ranking = 1) hingga yang paling jarang (ranking = 6). Ranking yang diperoleh dari seluruh responden dirata-ratakan. Alasan petani menyakapkan lahannya diinventarisasi dan dikompilasi untuk semua responden. Pemahaman teknologi anjuran oleh kelompok tani dan petani penyakap diukur dengan skor, dari skor = 5 sangat paham, hingga terendah skor 1 = belum mengerti. Skor antara kelompok tani dalam satu kabupaten dirata-ratakan, dan dinyatakan dalam persen tingkat pemahaman, dengan cara menjumlahkan skor 12 komponen teknologi dibagi 60, dikalikan 100%. Pemahaman informasi teknologi dinilai sangat baik apabila total skor pemahaman 60.

Informasi dari kelompok tani responden diekstrapolasi sebagai kondisi yang berlaku di kabupaten, mengingat budaya usahatani padi dalam satu kabupaten umumnya sama.

Hasil Penelitian

Kepemilikan lahan yang sangat sempit bagi sebagian besar petani tanaman pangan adalah masalah yang kronis di Indonesia. Berdasarkan data total luas lahan sawah nasional 7.885.878 ha (Deptan 2008), dan jumlah rumah tangga petani (RTP) tanaman pangan 17.830.832 RTP, maka tingkat kepemilikan lahan sawah rata-rata 0,44 ha/RTP. Tetapi bila menggunakan data sensus pertanian 2003, Menristek menyitir jumlah rumah tangga petani mencapai 25,4 juta RTP, yang berarti rata-rata kepemilikan lahan sawah hanya 0,31 ha/RTP. Rincian distribusi luas kepemilikan lahan, terdapat 9,6 juta RTP atau 54% petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha/RTP (BPS 2009, Tabel 1). Apabila kriteria petani berlahan sempit batasnya 0,5 ha, maka jumlahnya mencapai 65%. Petani dengan luas lahan 2 ha atau lebih berjumlah 1,55 juta RTP atau 8,7% dari jumlah petani. Terdapat 26,3% dari total petani yang memiliki lahan 0,7-1,99 ha. Luasan lahan 0,7 ha di berbagai daerah Jawa Tengah disebut sebagai satu *bau*, yang merupakan unit luasan pemilikan lahan per petani. Bila data sensus pertanian 2003 yang digunakan sebagai jumlah RTP, maka terdapat sekitar 7,6 juta atau 29% RTP tidak memiliki lahan. Di Jawa, jumlah petani tanpa lahan 29% cukup representatif. Di Karawang, misalnya jumlah petani tanpa lahan mencapai 39%, dan di Subang 60%.

Hasil penelitian ini menunjukkan, dari rata-rata sampel 30 kelompok tani di enam kabupaten, 70% anggota kelompok tani memiliki lahan 0,2-0,4 ha/RTP, kecuali petani sampel di Karawang yang memiliki lahan rata-rata 2 ha/RTP (Tabel 2). Dari 30 kelompok tani responden, terdapat 14 kelompok tani (47%) yang memiliki lahan rata-rata 0,2-0,34 ha/RTP; 11 kelompok tani (37%) memiliki lahan 0,35-0,5 ha/RTP, hanya dua kelompok tani (7%) yang memiliki lahan 0,55-1,0 ha/RTP, dan tiga kelompok tani (9%) memiliki lahan di atas 1,0 ha/RTP. Dari penelitian ini diperoleh data bahwa di tiga provinsi di Jawa, petani yang luas lahannya 0,5 ha atau kurang, mencapai 84% (data nasional

Tabel 1. Sebaran penguasaan lahan petani tanaman pangan di tingkat nasional, tahun 2009.

Kelas pemilikan lahan (ha/RTP)	Jumlah RTP petani	%
Kurang dari 0,1	1.237.674	6,94
0,1-0,499	8.307.396	46,59
0,5-0,999	4.005.091	22,46
1,0-1,99	2.723.563	15,27
2,0-2,99	897.901	5,04
> 3,0	651.300	3,65
Tanpa lahan	7.637	0,05

Sumber: BPS 2009.

RPT = rumah tangga petani

Tabel 2. Pemilikan lahan kelompok tani responden, Kabupaten Karawang, Subang, Klaten, Boyolali, Ngawi, dan Pasuruan, tahun 2009.

Kabupaten/ Kecamatan	Desa	Kelompok tani responden	Pemilikan lahan (ha/KK) ¹⁾			Cara pengelolaan		
			Rata- rata	Terkecil	Terluas	Dikerjakan sendiri (%)	Disakap- kan (%)	
Karawang								
Pedes	Kendaljaya	Mekar Tani	2,0(55)	0,5(30)	5(15)	60	40	
		Mekar Jaya	2,0(83)	0,7(10)	90(7)	25	75	
Jatisari	Baloggandu	Cahaya Sri	2,0(66)	0,18(25)	14(9)	70	30	
						52	48	
Subang								
Winong	Mulyasari	Simpan Sejahtera	0,7(65)	0,25(20)	2,0(15)	75	25	
		Tani Sejahtera	0,3(77)	0,20(15)	4,0(8)	90	10	
Pegaden Barat	Balingbing	Tunas Harapan III	0,4(65)	0,20(30)	2,0(5)	90	10	
		Tunas Harapan VII	0,4(55)	0,15(40)	4,0(5)	85	15	
						85	15	
Klaten								
Delunggu	Banaran	Usahatani	0,25(90)	0,125(5)	2,0(5)	50	50	
	Bawen	Kridatani	0,20(80)	0,125(10)	2,0(5)	28	72	
Wonosari	Bulan	Tani Makmur	0,2(75)	0,10(15)	1,0(10)	50	50	
Juwiring	Jaten	Rejeki Agung	0,25(80)	0,20(10)	0,6(10)	50	50	
Polanharjo	Gumuk	Tunas Karya	0,25(90)	0,125(5)	2,0(5)	50	50	
						46	54	
Boyolali								
Banyudono	Dengungan	Tani Agung	0,20(85)	0,1(5)	1,0(10)	30	70	
	Kertan	Marsudi	0,20(80)	0,125(10)	1,0(10)	20	80	
	Jembungan	Subur Makmur	0,33(83)	0,120(15)	4,0(2)	40	60	
	Banyudono	Makmur	0,22(75)	0,125(20)	2,0(5)	25	75	
						29	71	
Ngawi								
Paron	Gelung Jambangan	Sumber Bumi	0,40(60)	0,175(30)	1,0(10)	70	30	
		Sri Rejeki	0,45(40)	0,30(50)	2,0(10)	75	25	
		Sri Makmur	0,30(60)	0,10(36)	5,0(4)	70	30	
		Margo Tani	0,40(60)	0,10(30)	2,0(10)	75	25	
		Sumber Urip	0,40(78)	0,10(17)	1,0(5)	25	75	
	Semen	Tani Lestari	0,50(70)	0,15(26)	3,0(3)	20	80	
	Ngale	Sedio Makmur	0,35(80)	0,10(19)	1,5(1)	75	25	
	Kebon	Tani Rukun	0,36(73)	0,15(20)	1,5(7)	50	50	
							58	42
	Pasuruan							
Grati	Plososari	Gemah Ripah	0,70(54)	0,10(40)	1,25(1)	90	10	
		Sumberdawisari	Sri Rejeki	0,30(94)	0,10(5)	1,00(1)	45	55
	Ranuklindung	Dewi Sri I	0,25(70)	0,10(29)	4,0(1)	25	75	
		Dewi Sri II	0,35(73)	0,10(20)	2,0(7)	75	25	
		Dewi Sri III	0,33(80)	0,10(13)	2,0(7)	75	25	
	Karang Kliwon	T.A. Kamulyon	0,40(77)	0,175(20)	2,0(3)	50	50	
							60	40

65%), dan hanya 9% yang luas lahannya lebih dari 1 ha/RTP (data nasional 28%). Perbedaan tersebut disebabkan petani luar Jawa memiliki lahan sawah + lahan kering yang lebih luas dibandingkan dengan petani di Jawa. Jumlah petani lahan sawah di Jawa yang kepemilikan lahannya di atas 1 ha/RTP hanya 9%, menjadi indikator bahwa sebagian besar petani padi (91%) di Jawa berpenghasilan rendah bila pendapatannya hanya mengandalkan dari usahatani padi.

Dengan menggunakan angka pemilikan luas lahan dari hasil survei, petani padi sawah di Jawa dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni (1) petani gurem, 0,1-0,34 ha/RTP, (2) petani kecil, 0,35-0,5 ha/RTP; (3) petani skala medium, 0,55-1,0 ha/RTP; dan (4) petani skala luas, di atas 1,0 ha/RTP. Sebagai perbandingan, Pakistan membuat kategori petani menjadi tiga kelas dengan luasan lahan yang lebih besar, yaitu skala kecil bila kurang dari 5 ha/RTP; skala medium 5-10 ha/RTP; dan skala besar bila luas lahan lebih dari 10 ha/RTP (Abbas *et al.* 2008). Dibandingkan dengan petani Pakistan, petani padi di Indonesia hampir seluruhnya termasuk petani gurem. Kecilnya kepemilikan lahan sawah oleh petani di Indonesia mengakibatkan rendahnya pendapatan per rumah tangga petani, baik bagi petani pemilik lahan sebagai operator aktif, petani pemilik lahan yang menyakapkan lahan, maupun petani penyakap (Sumarno dan Kartasasmita 2009). Kecilnya skala usahatani juga berakibat pada rendahnya produktivitas tenaga kerja petani dan efisiensi produksi, walaupun tingkat produktivitas padi sawah di Jawa termasuk tertinggi.

Pada era pertanian subsisten, usahatani ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga, sehingga ketersediaan dan kecukupan bahan pangan sepanjang tahun merupakan indikator kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, kebutuhan petani tidak hanya pangan, sandang, dan papan (rumah), tetapi juga mencakup modal usahatani, pendidikan anak, kesehatan, transportasi, hiburan, komunikasi, energi, sosial dan keagamaan. Jenis kebutuhan yang beragam tersebut memerlukan biaya tunai yang cukup besar, yang harus dibayar dari hasil pendapatan usahatani. Kecilnya pendapatan yang berasal dari usahatani padi mengakibatkan petani cenderung mendiversifikasi pendapatan keluarganya dengan berbagai pilihan, antara lain: (a) menjadi pedagang pengumpul hasil pertanian, (b) tetap bertani dibarengi upaya menambah penghasilan dengan bekerja sebagai buruh usahatani, (c) mencari pekerjaan di luar pertanian, termasuk berdagang, (d) kegiatan industri rumah tangga, (e) menyerahkan lahan kepada panyakap, dan mencari pekerjaan *non-farm*, dan (f) menjual lahannya yang sempit, dan berganti profesi sebagai usahawan kecil-kecilan atau menjadi buruh tani.

Di semua lokasi penelitian, nampaknya berbagai alternatif kegiatan ekonomi tersebut ditemukan. Berusahatani padi bagi masyarakat desa tidak lagi dipandang sebagai misi penghidupan, melainkan lebih diposisikan sebagai kegiatan usaha ekonomi, dengan pertimbangan untung-rugi. Dengan demikian,

pemilik lahan sawah akan membuat pilihan rasional dalam tindakan manajemen usahatani atas dasar untung-rugi, dan mampu tidaknya memperoleh usaha alternatif yang menguntungkan. Pilihan tindakan pengelolaan padi sawah yang demikian dapat disebut sebagai tindakan "berusahatani secara rasional".

Pengelolaan Lahan Sawah

Pada masa penerapan teknologi revolusi hijau dalam periode 1970-1990-an, hampir seluruh petani pemilik lahan sawah adalah petani operator aktif. Mulai pada tahun 1995 terjadi pergeseran pengelolaan lahan dan dalam hal pengupahan, menuju kriteria komersial (Susilowati 1995).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat keragaman yang besar dalam hal pilihan tindakan pengelolaan lahan sawah oleh pemiliknya. Dari 30 kelompok tani responden, 55% pemilik lahan tetap memilih sebagai petani operator aktif, dan 45% pemilik lahan menyakapkan lahannya kepada petani penggarap (Tabel 3). Pada 21 kelompok tani, porsi petani operator aktif lebih dari 50% dan pada sembilan kelompok tani lainnya kurang dari 50%. Tingkat penyakapan terendah terdapat di Subang (15%), dan cukup besar untuk petani di Pasuruan (40%), Ngawi (42%), dan Karawang (48%). Petani padi di Klaten dan Boyolali bahkan sebagian besar menyakapkan lahannya, masing-masing 54% dari 71%. Penyakapan ternyata tidak bergantung pada luas pemilikan lahan, kecuali di Karawang hanya petani yang luas lahannya lebih dari 2 ha/ RTP yang menyakapkan lahannya.

Dengan tetap memiliki lahan dan mengaku berprofesi sebagai petani, penyakapan mencapai rata-rata 45% merupakan tingkat yang sangat tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa (a) melakukan usahatani padi sawah secara aktif kurang memberikan insentif keuntungan, atau (b) tindakan menyakapkan lahan sawah dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan bila dikelola

Tabel 3. Pengelolaan lahan sawah oleh 30 kelompok tani responden pada enam kabupaten, tahun 2009.

Kabupaten	Operator (%)	Disakapkan (%)	Kelompok tani sampel sebagai responden
Karawang	52	48	3
Subang	85	15	4
Klaten	46	54	5
Boyolali	29	71	4
Ngawi	58	42	8
Pasuruan	60	40	6
Rata-rata	55	45	

sendiri. Banyaknya masyarakat tani yang tidak memiliki lahan (di Karawang 39% dan di Subang 60% rumah tangga petani) juga mendorong pemilik lahan untuk menyakapkan lahan, karena adanya surplus tenaga pengangguran di perdesaan, yang merupakan sumber penawaran tenaga kerja yang murah.

Penyakapan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap (penyakap) antarwilayah memiliki pola berbeda. Di Karawang dan Subang, petani yang menyakapkan lahannya adalah petani berlahan luas, lebih dari 2 ha, dan penyakap diposisikan sebagai pembantu tetap pemilik lahan, karena petani pemilik lahan tetap mengelola aktif sebagian besar lahannya. Di Karawang dan Subang, pemilik lahan posisinya sebagai “juragan” atau semacam “tuan tanah”, dan penyakap sebagai “anak buah”. Peran pemilik lahan yang tetap sebagai operator aktif, dalam hubungannya dengan penyakap, adalah sebagai penentu pilihan teknologi yang harus diterapkan. Berbeda dengan petani di Klaten, Boyolali, Ngawi dan Pasuruan, penyakap diberi keleluasaan dalam memilih dan menerapkan teknologi. Pemilik lahan di empat kabupaten tersebut mengalihkan sepenuhnya pengelolaan lahannya, dalam hal pilihan teknologi usahatani padi sawah, kepada petani penyakap. Hal ini dapat berjalan dengan baik karena penyakap merupakan orang yang dapat dipercaya, dan tidak setiap petani tanpa lahan dapat menjadi penyakap. Penyakapan di Klaten, Boyolali, Ngawi, dan Pasuruan tidak ditentukan oleh luas kepemilikan lahan, tidak ada batasan minimal luas lahan petani untuk disakapkan.

Dalam hal operasionalisasi di sawah, baik petani operator aktif maupun penyakap, semuanya mengupahkan sebagian besar pekerjaan kepada buruh borongan, terutama dalam penyiapan lahan, tanam, dan penyiangan. Pekerjaan panen diupahkan kepada buruh pemanen dengan upah dalam bentuk bawon, atau uang tunai apabila padi dijual secara tebasan. Dengan demikian petani operator aktif maupun petani penyakap sebenarnya adalah “petani manejer”, bukan operator yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan usahatani padi memerlukan biaya tunai yang besar.

Alasan Petani Menyakapkan Lahan

Dengan pola penyakapan yang berbeda, alasan petani pemilik lahan menyakapkan lahan juga berbeda antarwilayah. Pada dasarnya ada tiga alasan utama petani mengalihkan pengelolaan lahannya kepada penyakap, yaitu (a) untuk mendapatkan bantuan tenaga kerja secara tetap, (b) memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih menguntungkan, dan (c) alasan sosial.

Di Karawang dan Subang, hanya petani yang lahannya luas yang menyakapkan sebagian lahannya, dengan tujuan agar petani penyakap dapat diikat sebagai tenaga kerja upahan tetap untuk membantu mengerjakan usahatani di lahan “juragan”nya. Alasan lain, pemilik lahan luas di Karawang

dan Subang menyakapkan adalah: (a) membantu memberi lapangan pekerjaan yang pasti kepada tetangga, (b) umur petani pemilik lahan sudah tua sehingga kurang kuat bekerja aktif di sawah, dan (c) lahannya cukup luas sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri. Petani di Karawang dan Subang tidak ada yang menyakapkan lahan sawahnya dengan alasan memilih bekerja di luar pertanian, selama mereka tinggal di desa asalnya. Generasi muda yang telah berpendidikan SMP atau SMA juga menyatakan tetap senang bekerja sebagai petani, apabila orang tuanya mempunyai lahan sawah yang luas. Nuansa sosial penyakapan lahan di Karawang dan Subang adalah sebagai transaksi antara majikan-buruh, atau antara “tuan tanah” dengan petani yang tidak bertanah. Di Karawang, pemilikan lahan sawah rata-rata kurang dari 1 ha dinilai “kurang menguntungkan”, dan pemiliknya cenderung menjual tanahnya kepada petani kaya, sehingga terjadi akumulasi pemilikan lahan. Di sisi lain, petani tanpa lahan jumlahnya menjadi semakin banyak.

Di Klaten, Boyolali, Ngawi, dan Pasuruan, alasan petani pemilik lahan menyakapkan lahannya adalah pertimbangan ekonomi dan status sosial. Secara kumulatif alasan penyakapan yang diberikan oleh petani pemilik lahan adalah: (a) lahan terlalu sempit sehingga tidak memberikan keuntungan ekonomi yang layak dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga apabila dikelola sendiri, (b) petani memilih mencari pekerjaan di luar pertanian yang hasilnya cepat, (c) biaya usahatani semakin besar yang dinilai tidak seimbang dengan pendapatan, (d) bertani padi kurang diminati oleh generasi muda yang berpendidikan, (e) usia petani telah tua, kurang kuat untuk bertani aktif, (f) membantu tetangga petani yang tidak memiliki lahan. Dari banyak alasan tersebut, nampaknya alasan utama petani pemilik lahan di empat kabupaten tersebut adalah ingin mengalihkan “usahatani yang untungnya kecil” kepada petani yang tidak memiliki kesempatan ekonomi dan merasa beruntung diberi hak untuk menyakap.

Tingkat penyakapan yang sudah tinggi saat ini nampaknya masih akan bertambah di masa depan, disebabkan oleh semakin bertambah banyaknya petani yang tidak memiliki lahan garapan sendiri, akibat fragmentasi dan penjualan lahan yang sangat sempit. Pelaku produksi pangan nasional semakin tersisih dan termarginalisasi, bergeser kepada petani penyakap yang tidak mempunyai banyak pilihan dari segi kesempatan ekonomi. Kemungkinan, hanya faktor keterpaksaan saja yang menjadi alasan mereka untuk tetap menanam padi sawah, dalam menjalankan “misi” mendukung keberlanjutan sistem produksi pangan nasional.

Partisipasi Petani dalam Penyuluhan

Dari 30 kelompok tani responden terdapat 22% petani penyakap yang menyatakan sangat sering atau sering mengikuti kegiatan penyuluhan, walaupun frekuensi penyuluhan rendah. Kategori agak sering mencapai porsi

38%, tetapi kehadiran satu kali dalam satu tahun sudah dinilai agak sering, karena penyuluhan jarang diberikan langsung kepada petani penyakap. Katagori jarang atau tidak pernah ikut adalah tidak mengikuti kegiatan penyuluhan, porsinya 40% (Tabel 4). Dari data tersebut dapat diperkirakan bahwa setiap kegiatan penyuluhan hanya dihadiri oleh 30-40% petani penyakap, yang berarti sekitar 60-70% petani penyakap tidak hadir. Mengingat besarnya porsi petani penyakap, tingkat partisipasi penyuluhan tersebut cukup mengkhawatirkan. Petani yang tidak ikut penyuluhan cenderung tetap tidak ikut dalam kegiatan penyuluhan pada tahun selanjutnya.

Partisipasi petani pemilik lahan sebagai petani operator pada kegiatan penyuluhan relatif sama dengan petani penyakap, 35-40% petani menghadiri kegiatan penyuluhan. Petani operator yang tidak pernah menghadiri kegiatan penyuluhan diperkirakan mencapai 40-45% dari rata-rata anggota 30 kelompok tani, sedangkan 15-25% anggota kadang-kadang hadir. Angka kehadiran rata-rata 35-40% sebenarnya rendah, apalagi telah ditugasinya “penyuluh THL”. Bahkan sebagian besar petani di Ngawi dan Pasuruan tidak pernah menghadiri penyuluhan, demikian juga di Klaten dan Boyolali.

Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan tercermin pula dari sumber informasi teknologi bagi petani dan tingkat pemahaman komponen teknologi oleh anggota kelompok tani. Rendahnya partisipasi petani pada penyuluhan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) frekuensi penyuluhan yang rendah, seperti disebutkan oleh beberapa responden bahwa penyuluhan hanya sekali dalam satu musim tanam; (2) materi penyuluhan kurang bermutu sehingga partisipasi atau kehadiran petani rendah, seperti dinyatakan oleh kelompok tani responden di Klaten, yang menyatakan tidak suka dengan penyuluhan teori atau ceramah di ruangan. Petani lebih menyukai bukti nyata di lapangan. Ketua kelompok tani menyatakan sering ikut penyuluhan, tetapi tidak dapat meneruskan informasi yang diperoleh ke anggota kelompok tani, dengan alasan tidak disediakan dana untuk kegiatan tersebut.

Tabel 4. Partisipasi petani penyakap dalam penyuluhan, dari 30 kelompok tani di enam kabupaten, tahun 2009.

Katagori partisipasi	Proporsi kategori (%)	
	Petani operator	Penyakap
Sangat sering	10	8
Sering	21	14
Agak sering	24	38
Jarang	23	31
Tidak pernah ikut	22	9

n = 30 kelompok tani di enam kabupaten.

Tingkat partisipasi petani penyakap terhadap penyuluhan bersifat spesifik di beberapa kabupaten. Petani penyakap yang termasuk sering sekali atau sering mengikuti penyuluhan adalah dari Subang dan Pasuruan. Petani penyakap yang menyatakan tidak pernah ikut atau jarang ikut penyuluhan terutama dari Karawang, Klaten, Boyolali, dan Ngawi. Partisipasi dengan katagori “agak sering” terjadi di semua kelompok tani di enam kabupaten. Hal yang menarik adalah kelompok tani dengan kategori partisipasi “agak sering”nya tinggi (di atas 35%), kategori partisipasi “jarang” dan “tidak pernah ikut” juga cenderung tinggi.

Sumber Informasi Teknologi bagi Petani Penyakap

Sumber informasi teknologi tidak ditanyakan kepada petani operator, tetapi kepada petani penyakap. Dari enam sumber informasi, yakni: (1) penyuluh pertanian; (2) Dinas Pertanian/Mantri Tani; (3) koran, radio, TV; (4) petugas penjual sarana produksi (*salesmen*); (5) pemilik lahan (bagi penyakap); (6) tetangga petani; petani penyakap diminta membuat urutan (ranking) dari yang paling banyak diterima. Informasi dari peneliti/pengkaji dan penyuluh di BPTP dimasukkan sebagai informasi yang berasal dari penyuluh pertanian.

Semua kelompok tani sampel yang anggotanya sebagian merupakan petani penyakap menjadikan petugas *sales* perusahaan sarana produksi sebagai sumber utama informasi teknologi (Tabel 5), petani tetangga yang lebih maju sebagai sumber informasi kedua, sedang penyuluh pertanian rankingnya hampir sama dengan petani pemilik lahan, sebagai sumber informasi ketiga. Hal ini menunjukkan rendahnya interaksi antara petani penyakap dengan penyuluh. Padahal jumlah petani penyakap mencapai 45% dari pelaku aktif sistem produksi padi. Di Klaten dan Boyolali, pemilik lahan tidak memberikan informasi teknologi apapun kepada petani penyakap. Apabila data Klaten dan Boyolali dipisahkan, peran pemilik lahan sebagai sumber informasi teknologi bagi penyakap rankingnya cukup tinggi, melebihi peran penyuluh pertanian. Peran petani pemilik lahan sebagai sumber informasi teknologi cukup tinggi bagi petani penyakap di Karawang, Subang, dan Pasuruan.

Tabel 5. Ranking sumber informasi teknologi petani penyakap. Rata-rata 30 kelompok tani responden di enam kabupaten, tahun 2009.

Sumber informasi	Rata-rata ranking	Ranking baru
Penyuluh Pertanian	3,9	3
Dinas Pertanian	4,9	4
Koran, TV, Radio	5,9	5
Petugas Sales	1,7	1
Pemilik lahan	3,7	3
Tetangga petani	1,95	2

n = 30 kelompok tani di enam kabupaten.

Peran Dinas Pertanian sebagai sumber informasi teknologi bagi petani penyakap termasuk kecil, berada pada urutan ke empat. Hal ini disebabkan karena tugas penyampaian informasi kepada petani telah didelegasikan kepada penyuluh, sehingga dapat dimaklumi bahwa interaksi pejabat/staf Dinas Pertanian dengan petani penyakap sangat jarang. Informasi teknologi dari koran, radio, dan TV bagi petani penyakap sangat minimal, karena mereka tidak membaca koran (seperti Sinar Tani), dan tidak memilih saluran siaran radio/TV yang memberikan informasi teknologi pertanian. Tidak relevan untuk memberikan saran menambahkan materi informasi teknologi padi sawah pada koran, radio, dan TV untuk petani penyakap, karena petani penyakap tidak akan mengakses informasi dari sumber tersebut.

Petugas sales memiliki kedekatan hubungan dengan petani penyakap, karena mereka menawarkan produk sambil menjelaskan teknis penggunaannya, manfaat penggunaan produk terhadap pertumbuhan dan hasil padi, dan secara personal menjawab pertanyaan-pertanyaan petani. Walaupun biasanya petugas sales didampingi oleh penyuluh, tetapi penyuluh tidak ikut menjelaskan teknik penggunaan dan manfaat produk, supaya tidak terjadi benturan kepentingan. Petugas sales memang dituntut untuk mendatangi petani dalam rangka promosi penjualan produknya. Petugas sales berpedoman pada prinsip penyuluhan "Prolasku" yaitu promosi, penjelasan, dan kunjungan yang ternyata cukup efektif. Kelemahannya adalah apabila produk yang ditawarkan petugas sales ternyata tidak memberikan manfaat seperti yang telah dijelaskan.

Penguasaan Komponen Teknologi

Dari jawaban semua kelompok tani responden di enam kabupaten diketahui komponen teknologi yang sudah dipahami dengan baik (skor 3,5-5,0) adalah varietas unggul baru, teknik persemaian, penyiapan lahan optimal, pengendalian gulma, dan panen dengan tingkat kehilangan gabah kurang dari 10% (Tabel 6).

Komponen teknologi yang tingkat pemahamannya oleh responden masih rendah (skor kurang dari 3,5) adalah manfaat benih bermutu, pengayaan bahan organik tanah, tanam bibit umur muda, tanam jajar legowo, teknik hemat air, dan PHT (pengendalian hama terpadu). Secara merata komponen teknologi yang tingkat pemahamannya sangat rendah (belum mengerti atau kurang mengerti) adalah tanam jajar legowo, teknik hemat air, PHT, tanam bibit umur muda, dan pengayaan bahan organik tanah. Tingkat pemahaman yang rendah berarti adopsi terhadap beberapa komponen teknologi tersebut juga rendah. Sebenarnya, senjang adopsi teknologi budi daya padi juga terjadi pada petani pemilik lahan sebagai operator aktif, yang mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas penyuluhan, terutama kepada petani operator skala kecil (Sumarno *et al.* 2009).

Tabel 6. Tingkat pemahaman petani penyakap terhadap komponen teknologi anjuran budidaya padi sawah, dari 30 kelompok tani di enam kabupaten, tahun 2009.

Komponen teknologi	Skor tingkat pemahaman teknologi oleh petani penyakap ¹⁾						
	Karawang ⁵⁾	Subang ⁵⁾	Klaten	Boyolali	Ngawi	Pasuruan	Rata-rata
Varietas unggul baru	5	5	3	3	4	2	3,7
Benih bermutu	4	4	4	3	3	2	3,3
Teknik pesemaian	4	4	4	3	4	2	3,5
Penyiapan lahan	5	4	5	5	4	4	4,5
Pengayaan BOT ²⁾	2	3	2	3	3	2	2,5
Bibit umur muda	3	2	2	2	3	2	2,3
Tanam jajar legowo	2	2	2	1	1	1	1,5
Teknik pemupukan	4	3	3	3	3	3	3,2
Hemat air	2	2	2	1	2	2	1,8
PHT ³⁾	2	2	2	2	2	2	2,0
Pengendalian gulma	5	5	4	5	4	4	4,5
Panen, hilang gabah <10%	4	5	5	5	5	4	4,7
Total skor	42	41	38	36	38	30	37,5
Tingkat pemahaman (%) ⁴⁾	70	68	63	60	63	50	63

1) Tingkat pemahaman:
 Skor 5 = sangat paham
 Skor 4 = mengerti atau paham
 Skor 3 = mengerti sebagian
 Skor 2 = kurang mengerti
 Skor 1 = belum mengerti

2) BOT = bahan organik tanah,

3) PHT Pengendalian hama terpadu

4) Tingkat pemahaman teknologi = $\frac{\text{Total skor}}{12 \times 5} \times 100\%$

5) Tingkat pemahaman petani penyakap di Karawang dan Subang nilainya tinggi karena mereka dibimbing penuh oleh pemilik lahan.

Pada masing-masing kabupaten, tingkat pemahaman teknologi kelompok tani (penyakap) di Karawang dan Subang menunjukkan total skor tertinggi, masing-masing 42 dan 41, atau 70% dan 68%. Hal tersebut berhubungan dengan sistem penyakapan di dua kabupaten tersebut, dimana penyakap dibimbing penuh oleh pemilik lahan sebagai "dunungan" atau boss. Di empat kabupaten lainnya, petani penyakap di "lepas" oleh pemilik lahan, tidak dibimbing tentang penerapan teknologi. Kelompok tani di Kabupaten Pasuruan memiliki total skor pemahaman teknologi yang terkecil, delapan dari 12 komponen teknologi dinilai belum dimengerti. Tingkat pemahaman teknologi oleh kelompok tani/penyakap di Pasuruan adalah 50%, terendah di antara enam kabupaten.

Rendahnya tingkat pemahaman teknologi tersebut memberikan indikasi bahwa alih teknologi dari penyuluh ke petani penyakap belum berjalan dengan

lancar. Bahkan skor pemahaman teknologi yang cukup tinggi pun sebenarnya adalah pemahaman empiris berdasarkan pengalaman dan bukti manfaat, belum merupakan pemahaman secara rasional. Program penyuluhan generasi II abad XXI seharusnya ditujukan untuk pemahaman teknologi secara rasional, sehingga petani tidak mudah tertipu oleh produk bohong atau pseudo-teknologi (Sumarno 2006).

Dalam hal penerapan teknologi dan tingkat produktivitas, semua kelompok tani responden menyatakan bahwa penyakapan lahan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah. Hasil padi pada lahan sawah yang disakapkan sama dengan bila lahan dikelola sendiri oleh petani pemilik lahan. Hal tersebut dimungkinkan karena penyakap yang hasil kerjanya kurang baik tidak boleh meneruskan penyakapan pada musim berikutnya, akan dialihkan ke penyakap lain.

Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dengan penyakap mengikuti dua macam pola yaitu: (1) Seluruh biaya produksi ditanggung penyakap, hasil panen bersih setelah dipotong bawon dibagi sama banyak, 50% : 50%. (2) Biaya sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida) dari pemilik lahan, upah kerja dari penyakap, 66% hasil panen bersih setelah dipotong bawon untuk pemilik lahan, dan 34% untuk penyakap. Porsi bagian penyakap dalam berbagai pola bagi hasil selalu lebih kecil, berkisar antara 25-35% dari hasil bersih. Luas lahan yang disakap terbanyak pada kisaran 0,2-0,3 ha, berarti perolehan keluarga petani penyakap hanya 0,25-0,53 ton per musim, dengan nilai sekitar Rp 750.000-1.590.000 per empat bulan. Pendapatan per bulan hanya Rp 187.500-397.500 per RTP, jauh lebih rendah dari upah minimum.

Jumlah petani penyakap di Jawa mencapai 45%. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sebagian besar petani di perdesaan berada di bawah garis kemiskinan. Hal yang sering kurang dipahami adalah kemiskinan bukan oleh profesi bertani padi, tetapi karena petani tidak memiliki lahan sama sekali, atau pemilikan lahan yang sangat sempit (Tabel 1, Tabel 2).

Pembahasan

Sistem produksi pangan nasional (beras), sebagian besar dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sempit (0,3-0,4 ha), yang memberikan pendapatan sangat rendah. Petani yang dinamis lebih memilih menyakapkan lahannya, dan beralih profesi ke bidang nonpertanian. Cukup besarnya jumlah petani yang menyakapkan lahannya (rata-rata 45%) memberikan signal yang kurang baik tentang stabilitas sistem produksi pangan nasional, karena bertani padi dipersepsikan sebagai pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Petani penyakap yang jumlahnya sangat banyak ternyata memiliki pendapatan sangat rendah, lebih rendah dibanding upah buruh minimal. Sebagian besar penyakap harus menyediakan seluruh biaya produksi, termasuk untuk pembelian benih, pupuk, pestisida, dan upah. Dapat dipahami bahwa adopsi teknologi anjuran sering terkendala oleh keterbatasan modal petani penyakap. Dalam kaitannya dengan hal ini, penyediaan kredit modal kerja bagi penyakap dan bagi petani skala kecil sangat dianjurkan, untuk mendukung upaya peningkatan produksi pangan (beras) nasional.

Pemecahan permasalahan kecilnya pemilikan lahan, petani gurem dan petani tanpa lahan/penyakap sangat sulit, dan tidak dibahas pada makalah ini. Dalam perspektif alih teknologi dan pemahaman teknologi, petani gurem dan penyakap, yang jumlahnya mencapai lebih dari 65% petani padi di Jawa, berada pada posisi yang kurang diuntungkan. Kegiatan penyuluhan cenderung disampaikan kepada ketua kelompok, petani maju, petani berlahan luas, dan menomorduakan petani gurem dan petani penyakap. Strategi demikian pada awal pembangunan pertanian dalam periode 1970-1990 tidak salah, guna percepatan adopsi teknologi dan untuk percepatan kemajuan pembangunan pertanian. Pada saat ini, setelah adopsi teknologi berjalan melalui petani kaya yang berfungsi sebagai pelopor, penyuluhan teknologi pertanian perlu diprioritaskan kepada petani kecil dan petani penyakap. Masih rendahnya tingkat pemahaman teknologi oleh petani penyakap memberi justifikasi perlunya pergeseran prioritas target penyuluhan.

Pemahaman teknologi budi daya padi oleh petani yang hingga kini masih bersifat empiris (berdasarkan penampakan pengaruh akhir dan pengalaman sebelumnya) perlu ditingkatkan menjadi pemahaman rasional. Hal ini penting untuk menjadikan petani padi Indonesia mampu bersaing dengan petani di negara maju, dan agar petani tidak mudah ditipu oleh penjual teknologi tidak nyata. Pengenalan PTT dan teknik penandaan padi (Zaini dan Erythrina 2008, Zaini 2007) pada dasarnya adalah dalam rangka menjadikan petani mengadopsi teknologi budi daya padi secara rasional.

Selama ini diasumsikan bahwa petani padi pasti akan menanam padi setiap musim, dan produktivitas padi terus meningkat oleh adanya adopsi teknologi. Tidak disadari bahwa menanam padi bagi petani dan keluarganya adalah usaha ekonomi, yang didasarkan pada perhitungan untung rugi. Petani penyakap yang sangat lemah dalam penyediaan modal usahatani dan yang tidak mempunyai akses terhadap sumber teknologi, perlu mendapatkan prioritas penyuluhan dan penyediaan kredit usahatani. Petani gurem, petani kecil, dan petani penyakap adalah penyedia pangan nasional yang perlu dijaga ketenangan hidupnya, dari segi ekonomi. Kalau mereka tidak bersedia menanam padi, karena alasan ungunya sangat kecil, lantas siapa yang akan memproduksi pangan bagi bangsa Indonesia.

Kesimpulan dan Saran Kebijakan

1. Kepemilikan lahan sawah di Jawa yang sangat sempit mendorong berkembangnya sistem penyakapan oleh pemilik lahan kepada petani tanpa lahan, dan pemilik lahan berganti usaha di luar pertanian. Penguasaan teknologi budi daya padi sawah oleh petani penyakap pada umumnya masih rendah, sumber informasi teknologi terbanyak justru dari petugas “sales” dan petani tetangga. Peran petugas penyuluh pertanian tergolong rendah, hanya menjadi sumber informasi ranking ketiga bagi petani penyakap.
2. Diperlukan reorientasi target peserta penyuluhan teknologi pertanian, lebih diprioritaskan kepada petani penyakap dan petani kecil (gurem), yang selama ini frekuensi kontak mereka dengan petugas penyuluh masih rendah. Karena sebagian besar pekerjaan usahatani dilakukan oleh tenaga buruh upahan lepas, disarankan agar penyuluhan juga diberikan kepada buruh tani upahan.
3. Berkembangnya pengelolaan lahan dengan pola penyakapan mengindikasikan bahwa petani pemilik lahan kurang dari 1 ha tidak mendapatkan penghasilan yang cukup bagi keluarganya. Padahal sekitar 80% petani tanaman pangan memiliki lahan dengan luasan 1 ha atau kurang. Untuk menjadikan para petani kecil dan petani penyakap tetap bertahan sebagai petani operator aktif, perlu dipikirkan insentif ekonomi bagi mereka, dalam berbagai bentuk, termasuk subsidi harga jual gabah, penyediaan kredit usaha, subsidi sarana produksi dan alsintan, dan insentif lainnya. Melestarikan profesi petani tanaman pangan (padi) dengan memberikan insentif bagi pelaku harus menjadi dasar kebijakan program pemerintah.
4. Rendahnya minat petani terhadap kegiatan penyuluhan dapat dimaknai bahwa program penyuluhan kurang mutakhir, dan kurang sesuai dengan kebutuhan petani. Diperlukan peningkatan dan harmonisasi hubungan penyuluh-peneliti-petani, dalam mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan teknologi yang mutakhir.
5. Penyakapan lahan merupakan bagian dari sistem produksi beras di Jawa. Petani penyakap merupakan bagian integral dari penyedia pangan nasional yang perlu diperhatikan nasibnya. Diperlukan ketentuan baku bagi hasil panen yang lebih adil dan layak, yang tidak merugikan petani penyakap.

Pustaka

- Abbas, M., T.E. Lodhi, A. Bashir, and M.A. Mahmood. 2008. Dissemination of wheat production technologies and interface of out-reach efforts with farmers. *J. Agric. Res.* 46(1):99-108.
- Abdulrachman, S., A. K. Makarim, I. Las, and I. Juliardi. 2006. Integrated crop management experiences on lowland rice in Indonesia. p.143-154. *In: Sumarno, Suparyono, A.M. Fagi, and M.O. Adnyana (eds.). Rice Industry, Culture, and Environment. Book 1. ICRR, ICFORD, IAARD, Jakarta, Indonesia.*
- Anonim. 2006. Petunjuk teknis program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian (Prima Tani). Badan Litbang Pertanian. Jakarta. 64p.
- BPS. 2009. Biro Pusat Statistik. Jakarta. Indonesia.
- Djatiharti, A., S.H. Mulya, I P. Wardana, and I. Juliardi. 2006. Farmer's perception on integrated crop management implementation in Java. p. 117-122. *In: Sumarno, Suparyono, A. M. Fagi, and M.O. Adnyana (eds.). Rice Industry, culture and environment. Book 1. ICFORD. Bogor.*
- Hayami, Y. and Kikuchi. 1981. Asian village economy at the cross roads: an economic approach to institutional change. University of Tokyo Press, Japan.
- Rogers, E.M. 1983. Diffusion of innovation. Third edition. The Free Press, New York.
- Spielman, D.J., and R. Birner. 2008. How Innovative is your agriculture. *Agr. and rural dev., Discussion paper No.41. IBRD-The World Bank. Washington DC.*
- Sumarno dan U.G. Kartasasmita. 2009. Kemiskinan dibalik peningkatan produktivitas padi sawah. Laporan Hasil Penelitian Analisis Kebijakan Tanaman Pangan Tahun 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- Sumarno, U.G. Kartasasmita, Z. Zaini, dan L. Hakim. 2009. Senjang adopsi teknologi dan senjang hasil padi sawah. *Buletin IPTEK Tanaman Pangan* 4(2):116-130.
- Sumarno. 2006. Peranan teknologi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. p. 38-47. *Dalam: I.W. Rusastra, N. Syafaat, dan K. Kariyasa (eds.). Pros. Seminar Revitalisasi Ketahanan Pangan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.*
- Susilowati, S.H. 2005. Gejala pergeseran kelembagaan upah pada pertanian padi sawah. *Forum Penelitian Agroekonomi* 23(1):48-60.

- Wardana, I.P., P. Bindraban, dan H. van Kuelen. 2006. Facilitating innovation for integrated crop and resources management of rice in West Java, Indonesia. pp.107-116. *In*: Sumarno, Suparyono, A.M. Fagi, and M.O. Adnyana (eds.). Rice Industry, Culture and Environment. Book 1. ICFORD. Bogor.
- Wargiono, J., Sumarno, A. Hasanuddin, D. Pasaribu, U.G. Kartasasmita, J. Soejitno, dan I.G. Ismail. 2008. Prosedur operasional standar budi daya padi sawah. Laporan Hasil Penelitian Analisis Kebijakan Tanaman Pangan Tahun 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Wiradi, G. 1978. Rural development and rural institutions: a study of institutional changes in Java. A thesis for degree of Master of Social Science. Universiti Sains Malaysia.
- Wiradi, G. 1974. Proses panen dan alat-alat panen yang digunakan. Paper series nomor 2. Survey Agroekonomi, Bogor.
- Zaini, Z, dan Erythrina. 2008. Pengembangan padi hibrida dengan pendekatan PTT dan penanda padi. IPTEK Tanaman Pangan 3(2):156-166.
- Zaini, Z. 2007. Percepatan alih teknologi pengelolaan tanaman terpadu melalui "penanda padi" (*rice check*). Seminar Nasional BPTP Sumatera Utara. Medan, 5 Juni 2007.